



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

# LAPORAN

## KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

2  
0  
2  
2

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
JL. PEMUDA KM 2 REMBANG  
Telp./Fax.( 0295 ) 692311**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes,

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 050/27/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN REMBANG



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi.....	2
1.3.1 Susunan Organisasi Perangkat daerah .....	3
1.3.2 Kondisi Pegawai .....	4
1.3.3 Data Sarana dan Prasarana.....	5
1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama .....	7
1.5 Landasan Hukum.....	14
1.6 Sistematika.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	19
2.1 Rencana Strategis .....	24
2.1.1 Visi .....	25
2.1.2 Misi .....	26
2.1.3 Tujuan.....	26
2.1.4 sasaran .....	27
2.1.5 Strategi.....	27

2.1.6	Kebijakan.....	28
2.2	Perencanaan Kinerja.....	31
2.3	Perjanjian Kinerja.....	33
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>40</b>
3.1	Capaian Kinerja Organisasi.....	40
3.2	Analisis Capaian Kinerja.....	57
3.3	Realisasi Anggaran.....	69
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
4.1	Kesimpulan.....	72
4.2	Rekomendasi.....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah pegawai Dinpermades Kab. Rembang.....	5
Tabel I. 2 Jumlah sarana dan prasarana Dinpermades Kab. Rembang .....	6
Tabel I. 3 Indeks Desa Membangun Kab. Rembang Tahun 2016-2022 .....	11
Tabel I. 4 Rekap Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2022 .....	12
Tabel I. 5 Perbandingan Status Perkembangan Kemandirian Desa .....	13
Tabel II. 1 Indikator Kinerja Utama Dinpermades Tahun 2022 .....	19
Tabel II. 2 Indikator Kinerja Sasaran Dinpermades Tahun 2022 .....	19
Tabel II. 3 Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2022 .....	20
Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Dinpermades Tahun 2022 .....	29
Tabel II. 5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinpermades Tahun 2022 .....	31
Tabel II. 6 Rencana Kinerja Dinpermades Tahun 2022 .....	31
Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Dinpermades Tahun 2022.....	34
Tabel II. 8 Target Kinerja Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2022.....	34
Tabel III. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	40
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2022 .....	41
Tabel III. 3 Rekap Status Desa Berdasarkan data IDM Tahun 2022 .....	43
Tabel III. 4 Penetapan Skor Kinerja Desa .....	45
Tabel III. 5 Kriteria Skor desa .....	45
Tabel III. 6 IKM Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2022.....	48
Tabel III. 7 Data BUMDESMA Kawasan Tahun 2022 .....	49
Tabel III. 8 Data BUMDESMA Lainnya Tahun 2022.....	51
Tabel III. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades Berdasarkan .....	55
Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Tahun 2022.....	58

Tabel III. 11 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	59
Tabel III. 12 Realisasi Capaian Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2022.....	61
Tabel III. 13 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Dinpermades Tahun 2022.....	62
Tabel III. 14 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65
Tabel III. 15 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja Dinpermades Tahun 2022	66
Tabel III. 16 Capaian Kinerja dengan Target RPJMD 2021-2026 .....	69
Tabel III. 17 Capaian Kinerja dengan Target Renstra Kementerian PDPT 2019-2024 .	70
Tabel III. 18 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2022.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinpermades Kabupaten Rembang* ..... 4

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam perspektif yang luas Laporan Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022 ini secara garis besar berisi tentang informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022.

Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja merupakan kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2022 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022.

#### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun kelima dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang periode Tahun 2022-2026.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah untuk

memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu dari pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang selama Tahun Anggaran 2022;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022;
3. Hasil evaluasi berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinpermades Kabupaten Rembang dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

### **1.3 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - Sub Bagian Program dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan dan Penataan Desa
4. Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa
5. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinpermades dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



**Tabel I. 1 Jumlah pegawai Dinpermades Kab. Rembang**

NO	URAIAN	PENDIDIKAN									JML
	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	SD	SMP	SMA	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tningkat I (I/d)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	Pengatur ( II/c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
3	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	2	-	-	-	3	-	-	5
	Penata (III/c)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	-	-	4	2	-	6
4	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	-	2	10	0	0	-	9	8	0	29

Sumber Data : Dinpermades 2022

**1.3.3 Data Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

**Tabel I. 2 Jumlah sarana dan prasarana Dinpermades Kab. Rembang**

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	1	Bidang	
2	Gedung	10	Gedung	- Gedung permanen : 7 - Gudang tertutup : 2 - Gedung pertemuan : 1
3	Alat Besar	1	Buah	Portable Generating Set
4	Alat angkutan Darat Bermotor	18	Buah	- Station Wagon : 5 - Kendaraan dinas bermotor perorangan : 1 - Sepeda Motor : 19
5	Alat Kantor	21	Buah	- Alat penyimpan perlengkapan kantor : 19 - Alat kantor lainnya: 2
6	Alat Rumah tangga	440	Buah	- Meubelair : 393 - Alat pembersih : 2 - Alat Pendingin : 24 - Alat rumah tangga lainnya (Home Use):21
7	Alat Pemadam kebakaran	1	Buah	
8	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17	Buah	- Kursi Putar : 3 - Meja/kursi kerja/rapat Pejabat :14
9	Lemari arsip	4	Buah	
10	Alat Studio	29	Buah	- Peralatan studio audio: 9 - Peralatan studio video dan film : 19 - Alat studio lainnya : 1

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
11	Alat Komunikasi Telephone	2	Buah	
12	Peralatan pemancar/parabola	1	Buah	
13	Komputer unit	56	Buah	- PC Unit : 6 - Laptop : 48 - Personal komputer lainnya : 2
14	Peralatan Komputer/hard disk	2	Buah	
15	Peralatan personal komputer	39	Buah	- Printer : 39 - External Harddisk : 5
16	Peralatan jaringan	2	Buah	- Server : 1 - Modem : 1
17	Jaringan listrik	2	Buah	
18	Sumur resapan	1	buah	

Sumber Data : Dinpermades 2022

#### 1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan. Hal ini disebabkan analisis isu strategis merupakan salah satu dasar perumusan misi pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli desa terhadap pendapatan desa
2. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan
3. Rendahnya keterlibatan masyarakat miskin, kelompok rentan, perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa

➤ **INDEKS DESA MEMBANGUN**

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu-isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan

menilai perkembangan desa;

- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

a. Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

b. Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

c. Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

d. Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya

adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

e. Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

✚ Rata-rata Nilai IDM

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. Ketahanan Sosial : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. Ketahanan Ekologi : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. Ketahanan Ekonomi : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedianya pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	IDM > 0,8155
MAJU	0,7072 < IDM < 0,8155
BERKEMBANG	0,5989 < IDM < 0,7072
TERTINGGAL	0,4907 < IDM < 0,5989
SANGAT TERTINGGAL	IDM < 0,4907

Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Rembang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel I. 3 Indeks Desa Membangun Kab. Rembang Tahun 2016-2022**

Indeks Desa Membangun	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0,605	0,636	0,634	0,677	0,680	0,706

Sumber data: Dinpermades 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Rembang sampai dengan Triwulan IV menunjukkan bahwa angka rata-rata 0,706% naik 0,026% dibanding Tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan 3 indeks komposit penilaian yaitu Sosial (IKS), Ekonomi (IKE), Lingkungan (IKL) di masing-masing desa.

**Tabel I. 4 Rekap Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2022**

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Sumber		4	14	-	-
2	Bulu		5	11	-	-
3	Gunem	2	14	-	-	-
4	Sale		2	13	-	-
5	Sarang		3	20	-	-
6	Sedan	1	8	12	-	-
7	Pamotan	1	3	19	-	-
8	Sulang	1	7	13	-	-
9	Kaliori	1	10	12	-	-
10	Rembang	8	18	1	-	-
11	Pancur	-	6	17	-	-
12	Kragan	-	7	20	-	-
13	Sluke	-	1	13	-	-
14	Lasem	-	11	9	-	-
	Jumlah	14	99	174		

Sumber data: Dinpermades 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 14 Kecamatan dan 287 desa di Kabupaten Rembang, terdapat 14 desa di 6 Kecamatan yang mempunyai desa dengan status Desa Mandiri, 99 desa di 14 Kecamatan dengan status Desa Maju dan status tertinggi dari 14 kecamatan di Kabupaten Rembang adalah Desa Berkembang yaitu sejumlah 174 desa dengan status Desa Berkembang.

**Tabel I. 5 Perbandingan Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2021 dan 2022**

No	Status	Tahun 2021	%	Tahun 2022	%	Keterangan
1	<b>Mandiri</b>	7	2.44%	14	4.88%	Naik
2	<b>Maju</b>	75	26.13%	99	34.49%	Naik
3	<b>Berkembang</b>	205	71.43%	174	60.63%	Turun
4	<b>Tertinggal</b>	0	0.00%	0	0.00%	-
5	<b>Sangat Tertinggal</b>	0	0.00%	0	0.00%	-
	<b>Jumlah</b>	<b>287</b>		<b>287</b>		

Sumber data: Dinpermades 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan dan penurunan status desa di tahun 2022. Status Desa Mandiri terjadi Kenaikan 2,44 % atau sejumlah 7 desa naik dari kriteria status Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Status Desa Maju terjadi Kenaikan sebesar 8,36 % atau naik sejumlah 24 desa dari kriteria status Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Sedangkan yang terjadi penurunan adalah Status Desa Berkembang, yang Turun sebesar 10,8 % atau 31 desa karena perubahan status menjadi Desa Maju. Dan sejak tahun 2021 sudah tidak terdapat desa Tertinggal maupun Desa Sangat Tertinggal.

## 1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang ini berdasarkan pada amanat Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor

- 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2022;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2026;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022;
  12. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **1.6 Sistematika**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab, sebagai berikut :

### **BAB. I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, gambaran singkat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja organisasi, kondisi pegawai, data sarana prasarana, pembiayaan, dan sistematika penyusunan.

## BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang acuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang sebagaimana penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, yang kemudian dari Renstra tersebut akan diturunkan dalam bentuk Renja sebagai dasar Rencana Kerja Tahunan (RKT). Capaian Kinerja dan Realisasi pelaksanaan dalam dokumen DPA dijabarkan dalam program dan kegiatan yang disyahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan pada tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya.

## BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut ;

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

$$\text{Rumus efisiensi} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya} \times 100\%}{\text{Target Biaya}} \right]$$

$$\text{Rumus efektivitas} = \left[ \frac{\text{Capaian Kinerja} \times 100\%}{\text{Target Kinerja}} \right]$$

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB. IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten. RPJMD tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang yang ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahunan.

Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu: **“REMBANG GEMILANG 2026”**. **Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

**GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**:

**Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang *ngopeni* dan *ngayomi* warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

**Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip *gampil* atau mudah diakses masyarakat.

**Gamblang** adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang menjadi

penopang utama dalam mencapai Misi IV : “Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal.”. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Dinpermades termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Kabupaten Rembang yakni “Terwujudnya Kemandirian Desa”. Sasaran dari tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Desa Berstatus maju dan mandiri” dengan indikator “Persentase desa Maju dan Mandiri”.

Adapun indikator kinerja utama dan target yang hendak dicapai pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel II. 1 Indikator Kinerja Utama Dinpermades Tahun 2022**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya Desa berstatus maju dan mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri	30,7%

Sedangkan indikator sasaran yang hendak dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel II. 2 Indikator Kinerja Sasaran Dinpermades Tahun 2022**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya Kemandirian Desa	% Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	1,2 %
	Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	54

Guna mencapai sasaran tersebut di atas dengan mempertimbangkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang telah menetapkan 5 program, 10 kegiatan, dan 41 sub kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel II. 3 Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2022**

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Nilai SAKIP OPD Dinpermades	70	<b>3.978.653.200</b>
		Nilai IKM OPD Dinpermades	80	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	% Keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	80%	27.500.000
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	10.500.000
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	5.000.000
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dok	12.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	80 %	2.956.775.000
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	2.793.255.000
b	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	163.520.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	% Dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	80%	7.778.500
a	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	7.778.500
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100 %	227.484.918
a	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.131.500

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	43.345.000
c	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	8.813.000
d	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	50.046.600
e	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.340.000
f	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.600.000
g	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	10.500.000
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	94.708.818
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>684.290.000</b>
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.000.000
b	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	57.600.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	46.070.000
d	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	578.620.000
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>% BMD dengan kondisi Baik</b>	<b>80</b>	<b>74.824.782</b>
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	74.824.782
<b>B</b>	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa</b>	<b>1,7</b>	<b>231.400.000</b>

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	% Desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa sesuai standart	1,7	231.400.000
a	Fasilitasi sarana dan prasarana desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	660	231.400.000
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADES</b>	<b>55</b>	<b>2.225.530.000</b>
1	Fasilitasi Kerjasama antar desa	% Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang % Bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	38 43	2.225.530.000
a	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	25.000.000
b	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5	1.403.000.000
c	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	797.530.000
<b>D</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan desa</b>	% Pemerintah Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas Rata-rata IKM Desa % Aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah desa	46,3 70 16	5.023.583.800
1	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	% Anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS % Desa dengan pengelolaan APBDes berkualitas % Pemerintah Desa dengan penatausahaan aset baik % pemerintah desa yang telah menerapkan standart pelayanan minimal desa	50 46 55 1,7	5.023.583.800

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
a	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	17.005.000
b	Fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	100	18.720.000
c	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	287	11.750.000
d	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	200	3.005.366.000
e	Pembinaan peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	46	0
f	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	287	99.808.800
g	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5	1.668.269.000
h	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	66.000.000
i	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	70	33.110.000
j	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	50	34.150.000
j	Fasilitasi Pengelolaan aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	287	67.595.000
k	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	287	1.810.000
<b>E</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga adat dan masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat desa aktif</b>	<b>58</b>	<b>948.088.000</b>
1	Pemberdayaan Lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	% Lembaga Ekonomi Desa Aktif	20	<b>948.088.000</b>
		% Lembaga sosial dan budaya aktif	85,6	
		% Posyantekdes aktif	70	

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
a	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya`	150	140.000.000
b	Fasilitasi Pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	91.561.000
c	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	36.527.000
d	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	30.000.000
e	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2	650.000.000

## 2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan Renstra tersebut tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Adapun Visi dan Misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 dan Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, yaitu sebagai berikut :

### 2.1.1 Visi

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu: **“REMBANG GEMILANG 2026”**.

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

**Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

**GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEM**ati, **gampIL** dan **gamblANG**:

**Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang *ngopeni* dan *ngayomi* warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

**Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganannya secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip *gampil* atau mudah diakses masyarakat.

**Gamblang** adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu

mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

Yang menjadi Visi Kabupaten Rembang periode tahun 2021 – 2026 adalah :

*Mewujudkan “REMBANG GEMILANG 2026”.*

### **2.1.2 Misi**

Misi adalah suatu tindakan yang harus dilaksanakan, sebagai suatu upaya untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tersebut, akan ditempuh melalui empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan tata kerja Birokrasi.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial.
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung Urusan yang menjadi core business yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun urusan tersebut mendukung Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keempat yaitu : *Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal* dengan tujuan *Terwujudnya Kemandirian Desa* serta sasaran daerah *meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri.*

### **2.1.3 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dan telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2022 adalah : **“Meningkatnya Desa berstatus maju dan mandiri.”**

Dengan indikator tujuan : *Persentase Desa Maju dan Mandiri.*

#### 2.1.4 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan adalah :

**“Meningkatnya Kemandirian Desa”** Dengan indikator sasaran : % *Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa dan Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa.*

#### 2.1.5 Strategi

Strategi Berdasarkan analisis isu-isu strategi maka dirumuskan beberapa strategi dasar dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

Strategi sesuai dengan Misi IV: **Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal** yaitu:

1. Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan;
2. Peningkatan pendampingan pengelolaan administrasi desa;
3. Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa;
4. Pendampingan pengelolaan aset;
5. Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan posyantek;
6. Fasilitasi Pameran produk, pembentukan forum, pendampingan kapasitas pengelolaan;
7. Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa;
8. Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;

10. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa;
11. Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;
12. Peningkatan pendampingan kapasitas perangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes;
13. Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan APBDes;
14. Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa sesuai kompetensi.

### 2.1.6 Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan menjadi sebuah ketentuan yang telah disepakati untuk dijadikan pedoman, pegangan, dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang. Kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2022 antara lain sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya Perdes kewenangan desa;
- 2) Supervisi, monitoring, evaluasi pengelolaan administrasi desa;
- 3) Sidak (Operasi Mendadak) bagi perangkat, monitoring dan evaluasi;
- 4) Bimbingan Teknis, monitoring, evaluasi pengelolaan aset;
- 5) Peningkatan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan penerapan pemanfaatan TTG
- 6) Bimbingan Teknis, Pelatihan dan rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- 7) Peningkatan peran pendamping desa dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa;

- 8) Peningkatan keterlibatan lembaga desa dalam proses pembangunan;
- 9) Bimbingan teknis, workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa;
- 10) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa;
- 11) Pelatihan/ Bimbingan teknis dan peningkatan pendampingan bagi BPD, Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tentang Perencanaan pembangunan desa, monitoring musrenbangdesa;
- 12) Pelatihan / Bimbingan teknis bagi perangkat desa dan BPD tentang penyusunan APBDes, monitoring administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku;
- 13) Pelatihan/ Bimbingan teknis PPKD, PK dan TPK tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa, monitoring, evaluasi.
- 14) Bimbingan Teknis, Workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa.

Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Dinpermades Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri	Meningkatnya Kemandirian Desa	1) Persentase Desa Maju dan Mandiri	19,9	28,6	30,7	32,8	34,8
			2) % Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	1	na	1,2	1,3	1,4
			3) Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	na	na	54	55	55,5
			4) Nilai Sakip OPD	66,93	na	70	72	75
			5) IKM	76,74	na	80	82	84

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
			6) % Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	0	Na	1,7	2	2,4
			7) Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	14	27	41	55	68
			8) Persentase Pemerintah desa dengan pengelolaan Keuangan desa berkualitas	Na	Na	46,3	47	49
			9) Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdес	Na	Na	16	17	19
			10) Rata-Rata IKM desa	Na	Na	70	71	72
			11) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	55	56	58	61	64

## 2.2 Perencanaan Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan tujuan, sasaran, indikator dan target yang akan dicapai sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel II. 5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinpermades Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tujuan : Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri	Indikator Kinerja Utama : Persentase Desa Maju dan Mandiri	30,7
Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	1) % Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	1,2
	2) Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	54

**Tabel II. 6 Rencana Kinerja Dinpermades Tahun 2022**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri		Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	30,7
		Meningkatnya Kemandirian Desa	% Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	%	1,2
			Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	angka	54

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
			Nilai Sakip OPD	angka	70
			IKM	angka	80
			% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	%	1,7
			Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PAdes	%	41
			Persentase Pemerintah desa dengan pengelolaan Keuangan desa berkualitas	%	46,3
			Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	%	16
			Rata-Rata IKM desa	angka	70
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	58

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang *seharusnya* tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2022 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021- 2026. Adapun rincian perjanjian kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Dinpermades Tahun 2022**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan : Meningkatkan Desa Berstatus Maju dan Mandiri	1) Persentase Desa maju dan Mandiri	%	30,7
2	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	2) % Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	%	1,2
		3) Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	angka	54

**Tabel II. 8 Target Kinerja Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2022**

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SAKIP OPD Dinpermades</b>	<b>70</b>	<b>3.978.653.200</b>
		<b>Nilai IKM OPD Dinpermades</b>	<b>80</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	<b>% Keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>80</b>	27.500.000
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	<b>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</b>	<b>1 dok</b>	10.000.000
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	<b>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>1 dok</b>	5.000.000
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2 dok</b>	12.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	<b>% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</b>	<b>80 %</b>	2.956.775.000
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>28</b>	2.793.255.000

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
b	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>1</b>	163.520.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	<b>% Dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	<b>80%</b>	7.778.500
a	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	<b>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>1 dok</b>	7.778.500
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>% Pemenuhan pelayanan umum</b>	<b>100 %</b>	227.484.918
a	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	6.131.500
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	43.345.000
c	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	8.813.000
d	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	50.046.600
e	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.340.000
f	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.600.000
g	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	10.500.000
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	94.708.818
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	<b>% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	684.290.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.000.000
b	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	57.600.000

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	46.070.000
d	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	578.620.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	% BMD dengan kondisi Baik	80	74.824.782
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	74.824.782
B	Program Penataan Desa	% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	1,7	231.400.000
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	% Desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa sesuai standart	1,7	231.400.000
a	Fasilitasi penataan kewenangan desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	660	231.400.000
C	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	55	2.225.530.000
1	Fasilitasi Kerjasama antar desa	% Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang	38	2.225.530.000
		% Bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	43	
a	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	25.000.000
b	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5	1.403.000.000
c	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	797.530.000

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
D	Program Administrasi Pemerintahan desa	% Pemerintah Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas  Rata-rata IKM Desa  % Aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah desa	46,3  70  16	5.023.583.800
1	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	% Anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS  % Desa dengan pengelolaan APBDes berkualitas  % Pemerintah Desa dengan penatausahaan aset baik  % pemerintah desa yang telah menerapkan standart pelayanan minimal desa	50  46  55  1,7	5.023.583.800
a	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokume Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	17.005.000
b	Fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	100	18.720.000
c	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	287	11.750.000
d	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	200	3.005.366.000
e	Pembinaan peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	46	0
f	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	287	99.808.800
g	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5	1.668.269.000

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
h	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	66.000.000
i	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	70	33.110.000
j	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	50	34.150.000
j	Fasilitasi Pengelolaan aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	287	67.595.000
k	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	287	1.810.000
E	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga adat dan masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat desa aktif	58	948.088.000
1	Pemberdayaan Lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	% Lembaga Ekonomi Desa Aktif % Lembaga sosial dan budaya aktif % Posyantekdes aktif	20 85,6 70	948.088.000
a	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya`	150	140.000.000
b	Fasilitasi Pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	91.561.000

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
c	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	36.527.000
d	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	30.000.000
e	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2	650.000.000

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja SKPD. Pengukuran Kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel III. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>100%	Sangat baik
2	85,00 % - 100%	Baik
3	65% - 84,99%	Cukup
4	50% - 64,99%	kurang
5	< 50,00 %	Sangat Kurang

Hingga akhir tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya, yaitu :

1. Tujuannya yaitu : Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri
2. Sasaran strategis yaitu : Meningkatnya kemandirian desa.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan ditegaskan pula dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada saat penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022. Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 2 Capaian Kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2022**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2022		CAPAIAN			RENSTRA	
			TARGET	REALISASI	2022	2021	2020	TARGET	%CAPAIAN (%) s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri		Persentase desa maju dan mandiri	30,7%	39,3%	39,3%	0,67%	0,63%	0,68%	128,01 %
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADEs terhadap pendapatan desa	1,2	1,57	1,57	na	1	1,6	130,83 %

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2022		CAPAIAN			RENSTRA	
			TARGET	REALISASI	2022	2021	2020	TARGET	%CAPAIAN (%) s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Rata-rata skor Kinerja Pemerintah desa	54	59	59	na	na	56,5	109,26 %
		Nilai Sakip OPD	70	67.17	67.17	66,92	66,93	76	95,96 %
		IKM	80	80,97	80	na	na	87	101,21 %
		% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	1,7	0	0	na	na	3	0
		Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	41	57	57	27	14	100	139,024 %
		Persentase Pemerintah desa dengan pengelolaan Keuangan desa berkualitas	46,3	51	51	na	na	56	110,151 %
		Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pmdes	16	0	0	na	na	26	0
		Rata-Rata IKM desa	70	0	0	na	na	74	0
		Persentase Lembaga Masyarakat Desa Aktif	58	47	47	56	55	69	81,03 %

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2022 atas 11 (sebelas) indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatas dapat disimpulkan bahwa 7 indikator telah memenuhi target atas indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan 4 indikator belum memenuhi target atas indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan status atas capaian IKD sampai dengan akhir tahun 2022 adalah **TERCAPAI** dengan nilai rata-rata OPD sebesar 117,24 %.

### **Persentase Desa Maju dan Mandiri**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Persentase Desa Maju dan Mandiri telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari target 30,7 % realisasi mencapai 39,3 % atau sebesar 128,01 %. Dasar Penghitungannya menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah desa Mandiri} + \text{Jumlah desa maju}}{\text{Jumlah desa Keseluruhan}} \times 100 \% = \frac{14 + 99}{287} \times 100\%$$

**Tabel III. 3 Rekap Status Desa Berdasarkan data IDM Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Sumber	18	0	4	14	0	0
2	Bulu	16	0	5	11	0	0
3	Gunem	16	2	14	0	0	0
4	Sale	15	0	2	13	0	0
5	Sarang	23	0	3	20	0	0
6	Sedan	21	1	8	12	0	0
7	Pamotan	23	1	3	19	0	0
8	Sulang	21	1	7	13	0	0
9	Kaliori	23	1	10	12	0	0
10	Rembang	27	8	18	1	0	0
11	Pancur	23	0	6	17	0	0

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
12	Kragan	27	0	7	20	0	0
13	Sluke	14	0	1	13	0	0
14	Lasem	20	0	11	9	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>287</b>	<b>14</b>	<b>99</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber Data : Dinpermades 2022

### **Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa**

Realisasi Tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,57% dari target sebesar 1,2%

Dasar penghitungan ini menggunakan formulasi ;

$$\left[ \frac{\text{Jumlah PADes se Kabupaten}}{\text{Jumlah Pendapatan desa}} \right] \times 100 \% = \frac{6.757.256.752}{428.897.503.055} \times 100 \%$$

### **Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa:**

Realisasi tahun 2022 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 59 % dari target sebesar 54 %. Dasar Penghitungan ini menggunakan formulasi :

$$\left[ \frac{\text{Jumlah skor kinerja desa}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \right] \times 100 \%$$

Dasar penghitungan untuk mengetahui nilai skor kinerja desa dengan menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\left[ \frac{\text{LRA belanja}}{\text{Total APBDes tahun 2022}} \right] \times 100\% = \frac{471.807.420.873}{486.674.584.502} \times 100 \% = 96,94\%$$

Dan untuk mengetahui skor kinerja desa dan kriteria skor desa dapat dilihat tabel sebagai berikut :

**Tabel III. 4 Penetapan Skor Kinerja Desa**

SKOR	PERSENTASE	SKOR	PERSENTASE	SKOR	PERSENTASE
61	100	40	79	19	58
60	99	39	78	18	57
59	98	38	77	17	56
58	97	37	76	16	55
57	96	36	75	15	54
56	95	35	74	14	53
55	94	34	73	13	52
54	93	33	72	12	51
53	92	32	71	11	50
52	91	31	70	10	49
51	90	30	69	9	48
50	89	29	68	8	47
49	88	28	67	7	46
48	87	27	66	6	45
47	86	26	65	5	44
46	85	25	64	4	43
45	84	24	63	3	42
44	83	23	62	2	41
43	82	22	61	1	40
42	81	21	60	0	39
41	80	20	59		

**Tabel III. 5 Kriteria Skor desa**

Kriteria	Skor
Buruk	0-20
Cukup	21-40
Baik	41-61

Berdasarkan tabel kriteria skor desa, Kinerja Pemerintah Desa masuk dalam kriteria **Baik**, dimana dalam penghitungannya memperoleh nilai persentase 96,94% dengan skor 57.

### **Nilai Sakip OPD**

Nilai sakip OPD Tahun 2022 memperoleh nilai 67,17 dari target yang telah ditetapkan sebesar 70 atau sekitar 95,96%. Formulasi untuk penghitungan Nilai Sakip OPD adalah sebagai berikut :

*Jumlah Nilai Komponen (Perencanaan Kinerja + pengukuran+Pelaporan Kinerja+ evaluasi internal + Pencapaian sasaran Kinerja Organisasi) (Hasil Review Inspektorat Kabupaten )*

### **IKM**

Capaian Nilai IKM OPD Dinpermades Tahun 2022 sebesar 80,97 dari target yang telah ditetapkan yaitu 80 atau sebesar 101,21%.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif** : Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dari hasil pengukuran IKM Dinpermades diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel III. 6 IKM Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2022

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Beaya/ Tarif	produk	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Sarana Prasarana	Penanganan Pengaduan
<b>IKM per unsur</b>	<b>3,08</b>	<b>3,14</b>	<b>3,05</b>	<b>3,99</b>	<b>3,18</b>	<b>3,16</b>	<b>3,23</b>	<b>2,98</b>	<b>3,63</b>
<b>Kategori</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>80,97 (B atau Baik)</b>								

#### **% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa**

Dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,7, Dinpermades belum mampu memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan atau sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tahun 2022 belum ada anggaran untuk mendukung kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah Desa sebagai penopang indikator kinerjanya.

Dasar penghitungannya menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah desa yang mempunyai dokumen batas wilayah desa}}{\text{jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$$

Untuk selanjutnya Dinpermades akan melaksanakan koordinasi serta mengusulkan terkait penganggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud.

#### **% Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang Berkontribusi terhadap PADes**

Capaian kinerja mencapai 57 % dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 41% atau sebesar 139,025%. Formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\left[ \frac{\text{Jml Bumdesma Kawasan dan Bumdesma lainnya yg Berkontribusi thdp PADes}}{\text{Jml Bumdesma kawasan dan Bumdesma lainnya keseluruhan}} \right] \times 100\%$$

Di Kabupaten Rembang terdapat 1 Bumdesma kawasan yang berkontribusi terhadap PADes, yaitu Bumdesma Sumber Alas Samudrawela dan terdapat 3 Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes, yaitu Bumdesma Sambung Tani Barokah, Bumdesma Sarang Anggegayuh Sesarengan, dan Bumdesma Bulu Lestari Makmur. Sedangkan Jumlah keseluruhan Bumdesma Kawasan adalah 4, dan jumlah keseluruhan Bumdesma lainnya adalah 3.

Sehingga dasar penghitungannya sebagai berikut :

$$\frac{1 + 3}{4 + 3} \times 100\% = \frac{4}{7} \times 100\% = 57\%$$

**Tabel III. 7 Data BUMDESMA Kawasan Tahun 2022**

No	Nama Bumdesa Bersama	Desa	kecamatan
<b>A</b>	<b>SUMBER ALAS SAMUDRAWELA</b>		
1		PASARBANGGI	REMBANG
2		TRITUNGGAL	REMBANG
3		PUNJULHARJO	REMBANG
4		GEDONGMULYO	LASEM
5		DASUN	LASEM
6		TASIKSONO	LASEM
<b>B</b>	<b>ARGA MAKMUR</b>		
1		WARUGUNUNG	PANCUR
2		CRIWIK	PANCUR
3		BANYUURIP	PANCUR
4		JOHOGUNUNG	PANCUR
5		GOWAK	LASEM
6		KAJAR	LASEM
7		SENDANGCOYO	LASEM

No	Nama Bumdesa Bersama	Desa	kecamatan
<b>C</b>	<b>MITRA DESA SEJAHTERA</b>		
1		PULO	REMBANG
2		SUKOHARJO	REMBANG
3		TRITUNGGAL	REMBANG
4		TASIKAGUNG	REMBANG
5		GEGUNUNGWETAN	REMBANG
6		JOLOTUNDO	LASEM
7		BABAGAN	LASEM
8		DOROKANDANG	LASEM
9		BINANGUN	LASEM
10		LERAN	SLUKE
11		PANGKALAN	SLUKE
12		KARANGHARJO	KRAGAN
13		PANDANGAN WETAN	KRAGAN
14		SUMBERAGUNG	PANCUR
<b>D</b>	<b>KAPALAS SIMOTURUN</b>		
1		LAMBANGAN WETAN	BULU
2		SUMBER MULYO	BULU
3		KARANGASEM	BULU
4		PASEDAN	BULU

Sumber Data : Dinpermades 2022

Tabel III. 8 Data BUMDESMA Lainnya Tahun 2022

No	Nama Bumdesa Bersama	Desa	kecamatan
<b>A</b>	<b>SAMBUNG TANI BAROKAH</b>		
1		KALIPANG	SARANG
2		DADAPMULYO	SARANG
		GONGGANG	SARANG
<b>B</b>	<b>SARANG ANGGEGAYUH SESARENGAN</b>		
1		LODAN WETAN	SARANG
2		BONJOR	SARANG
3		TAWANGREJO	SARANG
4		SAMPUNG	SARANG
5		BATURNO	SARANG
6		BABAKTULUNG	SARANG
7		NGLOJO	SARANG
8		JAMBANGAN	SARANG
9		PELANG	SARANG
10		GILIS	SARANG
11		GUNUNG MULYO	SARANG
12		GONGGANG	SARANG
13		SUMBERMULYO	SARANG
14		KALIPANG	SARANG
15		DADAPMULYO	SARANG
16		SENDANGMULYO	SARANG
17		BANOWAN	SARANG
18		TEMPERAK	SARANG
19		KARANGMANGU	SARANG
20		BAJINGJOWO	SARANG

No	Nama Bumdesa Bersama	Desa	kecamatan
21		BAJINGMEDURO	SARANG
22		SARANGMEDURO	SARANG
<b>C</b>	<b>BULU LESTARI MAKMUR</b>		
1		BULU	BULU
2		CABEAN	BULU
3		JUKUNG	BULU
4		KADIWONO	BULU
5		KARANGASEM	BULU
6		LAMBANGAN KULON	BULU
7		LAMBANGAN WETAN	BULU
8		MANTINGAN	BULU
9		MLATIREJO	BULU
10		NGULAAN	BULU
11		PASEDAN	BULU
12		PINGGAN	BULU
13		PONDOKREJO	BULU
14		SENDANGMULYO	BULU
15		SUMBERMULYO	BULU
16		WARUGUNUNG	BULU

Sumber Data : Dinpermades 2022

### **% Pemerintah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa Berkualitas**

Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 51% dari target yang telah ditetapkan sebesar 46,3 % atau sebesar 110,151%. Formulasi penghitungannya sebagai berikut :

*% desa yang menetapkan perdes APBDes tepat waktu + % Desa dengan progres pendapatan asli desanya (PADes)meningkat + % desa yang menetapkan Perdes pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desanya dibagi 3*

Dasar penghitungannya sebagai berikut :

- % Desa yang menetapkan Perdes APBDes tepat waktu :  

$$\frac{150}{287} \times 100\% = 52\%$$
- % Desa dengan progres PADes meningkat :  

$$\frac{6.488.116.402}{476.557.896.148} \times 100\% = 1,4\%$$
- % Desa yang menetapkan Perdes Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa tepat waktu : 100

Sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{52\% + 1,4\% + 100\%}{3} = \frac{153,4}{3} = 51\%$$

### **% aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes**

Dari target yang telah ditetapkan sebesar 26 %, Dinpermades belum mampu memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan atau sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tahun 2022 belum ada anggaran untuk mendukung kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagai penopang indikator kinerjanya.

Formulasi penghitungannya sebagai berikut :

*Jumlah kepala desa yang pernah mendapatkan pembekalan /pelatihan + perangkat desa yg telah mengikuti pelatihan teknis + anggota BPD yg telah mendapatkan pembekalan teknis dibagi 3*

Untuk selanjutnya Dinpermades akan melaksanakan koordinasi serta mengusulkan terkait penganggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud.

### **Rata-rata IKM Desa**

Dari target yang telah ditetapkan sebesar 70, Dinpermades belum mampu memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan atau sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tahun 2022 desa belum melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat sehingga belum bisa mengukur nilai IKM desa sebagai penopang indikator kinerjanya.

Formulasi penghitungannya sebagai berikut :

***Total IKM desa se-Kabupaten Rembang dibagi jumlah desa se Kabupaten Rembang***

Untuk selanjutnya Dinpermades akan melakukan bimbingan dan pendampingan kepada desa dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.

### **% Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif**

Capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 47 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 58% atau sebesar 81,03 %.

Formulasi penghitungannya sebagai berikut :

**% lembaga sosial budaya desa aktif + % lembaga ekonomi desa aktif+ % posyantekdes aktif**

$$= \frac{91\% + 18,7\% + 31\%}{3} = 47\%$$

Sedangkan untuk dasar penghitungannya sebagai berikut :

#### ➤ % lembaga sosial budaya desa aktif

Formulasi penghitungannya sebagai berikut :

**% lembaga desa aktif+ % psoyandu Purnama dan mandiri+ % BPSPAMS aktif + % PKK aktif dibagi 4**

$$- \text{ % LPMD AKTIF} = \frac{287}{287} \times 100\% = 100\%$$

$$- \text{ % Posyandu purnama dan Mandiri} = \frac{868}{1231} \times 100\% = 70\%$$

$$- \text{ % BPSPAMS aktif} = \frac{169}{180} \times 100\% = 94\%$$

$$- \text{ % PKK aktif} = \frac{287}{287} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Sehingga penghitungannya sebagai berikut : } \frac{100\% + 70\% + 94\% + 100\%}{4} = 91\%$$

#### ➤ % lembaga ekonomi desa aktif

Menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut :

**% Bumdes yang berkontribusi PADes + % Bumdes Klasifikasi maju + % pasar desa berkontribusi PADes dibagi 3**

- % bumdes yang berkontribusi PADes =  $\frac{36}{249} \times 100\% = 14,5\%$
- % Bumdes klasifikasi maju =  $\frac{4}{249} \times 100\% = 1,2\%$
- % pasar desa berkontribusi PADes =  $\frac{10}{25} \times 100\% = 40\%$

Sehingga didapat perhitungan =  $\frac{14,5\% + 1,2\% + 40\%}{3} = 18,7\%$

➤ % posyantekdes aktif

Dasar penghitungannya yaitu ;  $\frac{13}{41} \times 100\% = 31\%$

**Tabel III. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades Berdasarkan Program dan Kegiatan**

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	
I	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	70	67,17	95,96%
		Nilai IKM OPD	80	80,97	101,21%
	1 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah	80	80	100%
	2 Administrasi keuangan Perangkat daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	80	80	100%
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	80	80	100%
	4 Administrasi Umum Perangkat daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100	100	100%
	5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	% pemenuhan pelayanan penunjang perkantoran	100	100	100%
	6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	% BMD dengan kondisi baik	80	80	100%

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	
II	<b>Program penataan Desa</b>	<b>% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Penyelenggaraan Penataan Desa	% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	1,7	0	0
III	<b>Program Kerjasama Antar Desa</b>	<b>Persentase Bumdesma kawasan perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes</b>	<b>41</b>	<b>57</b>	<b>139,02%</b>
	1 Fasilitasi Kerjasama antar desa	% Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang	38	50	131,38%
		% Bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	43	66	153,49
IV	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>% Pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas</b>	<b>46,3</b>	<b>51</b>	<b>110,15%</b>
		<b>Rata- rata IKM desa</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>% Aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahah desa</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	% anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS	50	53	106%
		% Desa dengan pengelolaan APBDes berkualitas	46	51	110,87%
		% Pemerintah desa dengan penatausahaan aset baik	55	59	107,27
		% pemerintah desa yang telah menerapkan standart pelayanan minimal desa	1,7	100	5882,35%
V	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif</b>	<b>58</b>	<b>47</b>	<b>81,03</b>

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	
	1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	% lembaga ekonomi desa aktif	20	18.7	93,50%
		% Lembaga sodial dan budaya aktif	85,6	91	106,31%
		% Posyantekdes aktif	70	31	44,29%

Dari tabel diatas, untuk pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 8 indikator kinerja dan 10 kegiatan dengan 16 indikator kinerja.

Dari 8 indikator kinerja program dan 16 indikator kinerja kegiatan, terdapat 4 indikator program dan 3 indikator kegiatan yang tidak mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sedangkan capaian IKD telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian realisasi target rata-rata mencapai 117,24% .

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka untuk setiap pernyataan kinerja sebagai berikut :

## 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

**Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Tahun 2022**

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data
A	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri	Persentase Desa maju dan mandiri	30,7%	39,3%	128,01%	Memuaskan	Dinpermades
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,2%	1,57%	130,83%	Memuaskan	Dinpermades
a		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	54	59	109,26%	Memuaskan	Dinpermades
b		Nilai Sakip OPD	70	67,17	95,96%	Sangat baik	Dinpermades
c		IKM	80	80,97	101,21%	Memuaskan	Dinpermades
d		% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	1,7%	0	0	Sangat Kurang	Dinpermades
e		Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma Lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	41%	57%	139,024%	Memuaskan	Dinpermades
f		Persentase pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	46,3%	51%	110,151%	Memuaskan	Dinpermades
g		Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	16%	0	0	Sangat Kurang	Dinpermades

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data
h		Rata-rata IKM desa	70	0	0	Sangat Kurang	Dinpermades
i		Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	58%	47%	81,03%	Baik	Dinpermades

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 11 indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, 6 indikator kinerja Utama dapat tercapai diatas **100%** atau kategori “**Memuaskan**”, dan 2 indikator kinerja utama dengan kategori “**Sangat Baik**” dan 3 indikator kinerja utama belum bisa mencapai target yang telah ditentukan, atau masuk dalam kategori “**Kurang**”

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun )

**Tabel III. 11 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Terakhir**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
A	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	0,67%	0,67%	100%	0,68%	0,68%	100%	30,7%	39,3%	128,01%
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	na	na	na	na	na	na	1,2%	1,57%	130,83%
a		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	Na	Na	Na	Na	Na	Na	54	59	109,26%

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
b		Nilai Sakip OPD	Na	66,93	Na		66,92		70	67,17	95,96%
c		IKM	Na	Na	Na	Na	Na	Na	80	80,97	101,21%
d		% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	Na	Na	Na	Na	Na	Na	1,7%	0	0
e		Persentase Bumdesma kawasan perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	Na	Na	Na	Na	Na	Na	41	57	139,024 %
f		Persentase pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	Na	Na	Na	Na	Na	Na	46,3%	51%	110,151 %
g		Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pempdes	Na	Na	Na	Na	Na	Na	16	0	0
h		Rata-rata IKM desa	Na	Na	Na	Na	Na	Na	70	0	0
i		Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa aktif	Na	55	Na	90	100	111,1%	58%	47%	81,03%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel III. 12 Realisasi Capaian Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2022**

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023	Tingkat Kemajuan
A	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	39,3%	32,8%	-6,5 %
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,57%	1,3%	-0,27
a		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	59	55	-4
b		Nilai Sakip OPD	67,17	72	4,83
c		IKM	80,97	82	1,03
d		% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	0	2%	2
e		Persentase Bumdesma kawasan perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	57%	55%	-2
f		Persentase pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	51%	47%	-4
g		Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	0	17%	17
h		Rata-rata IKM desa	0	71	71
i		Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa aktif	47	61%	14

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

**Tabel III. 13 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Dinpermades Tahun 2022**

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	30,7%	39,3 %	128,01%	Capaian realisasi mencapai 128,015%, karena ada peningkatan status desa Maju dan Mandiri dari tahun sebelumnya. 7 desa Status Desa maju naik menjadi desa mandiri dan 24 desa naik dari status desa berkembang menjadi status desa maju	-
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,2%	1,57%	130,83%	Total jumlah PADes se Kabupaten sebesar Rp. 6.757.256.752 dan total jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 428.897.503.055 sehingga capaian realisasi melampaui target yaitu sebesar 130,83%	
		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	54	59	109,26 %	Dari total APBDes tahun 2022 sebesar 486.674.584.502 terdapat realisasi anggaran belanja sebesar 471.807.420.873, sehingga capaian realisasi nya 96,94%	

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Nilai Sakip OPD	70	67,17	95,96%	Komponen untuk mengukur Nilai SAK IP terdiri dari Perencanaan Kinerja + pengukuran+Pelaporan Kinerja+ evaluasi internal + Pencapaian sasaran Kinerja Organisasi (Hasil Review Inspektorat Kabupaten )	
		IKM	80	80,97	101,21 %	Pengukuran IKM berdasarkan 9 unsur yaitu 1. Persyaratan; 2. Sistem mekanisme dan prosedur; 3. waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. kompetensi pelaksana, 7. perilaku pelaksana 8. penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. sarana dan prasarana	
		% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	1,7%	0	0	Dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,7, Dinpermades belum mampu memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan atau sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tahun 2022 belum ada anggaran untuk mendukung kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah Desa sebagai penopang indikator kinerjanya.	Melaksanakan koordinasi dan mengusulkan terkait penganggaran untuk mendukung kegiatan tersebut
		Persentase Bumdesma kawasan perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADES	41%	57%	139,024 %	terdapat 1 Bumdesma kawasan yang berkontribusi terhadap PADES dari 4 Bumdesma kawasan dan 3 Bumdesma lainnya sudah berkontribusi terhadap PADES	

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Persentase pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	46,3%	51%	110,151 %	Capaian realisasi telah melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 110,151%	-
		Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdес	16%	0	0	Dari target yang telah ditetapkan sebesar 26 %, Dinpermades belum mampu memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan atau sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tahun 2022 belum ada anggaran untuk mendukung kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagai penopang indikator kerjanya	Melaksanakan koordinasi dan mengusulkan terkait penganggaran untuk mendukung kegiatan tersebut
		Rata-rata IKM desa	70	0	0	Dari target yang telah ditetapkan sebesar 70, Dinpermades belum mampu memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan atau sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tahun 2022 desa belum melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat sehingga belum bisa mengukur nilai IKM desa sebagai penopang indikator kerjanya.	Untuk selanjutnya Dinpermades akan melakukan bimbingan dan pendampingan kepada desa dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa aktif	58%	47%	81,03%	Dari 249 BUMDES di Kab. Rembang hanya 4 BUMDES yang memiliki klasifikasi maju; dan dari 50% (25) pasar desa hanya 40% (10) pasar desa yang berkontribusi terhadap PADes	Melakukan monitoring dan pelatihan pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III. 14 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	
I	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	30,7%	39,3%	128,01%	-	-	-	-
A	Meningkatnya kemandirian desa				-	-	-	-
	1. Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,2	1,57	130,83%	-	-	-	-
	2. Rata-rata skor Kinerja Pemerintah desa	54	59	109,26%	-	-	-	-
	3. Nilai SAKIP OPD	70	67,17	95,96%				
	4. IKM	80	80,87	101,21%	3.907.345.336	3.907.345.336	98,21	1,79%
	5. Persentase desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	1,7 %	0	0	231.400.000	224.943.000	97,21	2,79%
	6. Persentase Bumdesma kawasan perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	41%	57%	139,024%	2.225.530.000	2.196.952.115	98,72	1,28%
	7. Persentase Pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	46,3%	51%	110,151%				
	8. Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	16	0	0	5.023.583.800	4.956.312.226	98,66	1,34%
	9. Rata-rata IKM desa	70	0	0				
	10. Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	58	47	81,03%	948.088.000	931.302.000	98,23	1,77

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel III. 15 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja Dinpermades Tahun 2022**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Presentase desa maju dan mandiri	128,01%				Menunjang
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	130,83%				Menunjang
				<b>I. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>95,96%</b>	Menunjang
					<b>Nilai IKM OPD</b>	<b>101,21 %</b>	Menunjang
				1.Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	100%	Menunjang
				2.Administrasi keuangan Perangkat daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Menunjang
				3.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	Menunjang
				4.Administrasi Umum Perangkat daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100%	Menunjang
				5.Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	% pemenuhan pelayanan penunjang perkantoran	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	% BMD dengan kondisi baik	100%	Menunjang
				<b>II. Program penataan Desa</b>	<b>% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa</b>	<b>0</b>	Tidak Menunjang
				1. Penyelenggaraan Penataan Desa	% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	0	Tidak Menunjang
				<b>III. Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Persentase Bumdesma kawasan Perdesaan dan Bumdesma Lainnya yang berkontribusi terhadap PAdes</b>	<b>139,024%</b>	Menunjang
				1. Fasilitasi Kerjasama antar desa	% Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang	131,58	Menunjang
					% Bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	153,49	Menunjang
				<b>IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>% Pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas</b>	<b>110,151 %</b>	Menunjang
					<b>Rata-rata IKM desa</b>	<b>0</b>	Tidak Menunjang
					<b>% aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah desa</b>	0	Tidak Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	% anggaran desa yang mendukung Pronangkis	106%	Menunjang
			% desa dengan pengelolaan APBDes berkualitas		110,87%		
			% Pemerintah desa dengan penatausahaan aset baik		107,27%		
			% pemerintah desa yang telah menerapkan standart pelayanan minimal desa		5882,35%		
				<b>V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif</b>	<b>81,03%</b>	Menunjang
				1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	% lembaga ekonomi desa aktif	93,50%	Menunjang
					% lembaga sosial budaya aktif	106,31%	Menunjang
					% posyantekdes aktif	44,29%	Menunjang

Sumber Data : Dinpermades 2022

Dari tabel diatas, untuk pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 8 indikator kinerja dan 10 kegiatan dengan 16 indikator kinerja.

Dari 8 indikator kinerja program dan 16 indikator kinerja kegiatan, terdapat 3 indikator program dan 2 indikator kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor.

**Tabel III. 16 Capaian Kinerja dengan Target RPJMD 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Target RPJMD	Capaian 2022 dengan RPJMD
1	Tujuan : Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Presentase desa maju dan mandiri	39,3%	30,7%	128%
2	Program penataan Desa	% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	0	1,7	0%
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Bumdesma kawasan Perdesaan dan Bumdesma Lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	57%	41%	139%
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas	51%	46,3%	110%
		Rata-rata IKM desa	0	70%	0%
		% aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah desa	0	16%	0%
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	47%	58%	81%

Berdasarkan tabel III.16 bahwa dibandingkan dengan target RPJMD 2021-2026, capaian Dinperdades terlihat ada tiga indikator yang capaiannya melebihi 100 % hal ini menunjukkan fasilitasi yang dilakukan efektif mendorong pemerintah desa untuk bergerak mencapai kemandirian. Satu indikator mencapai 81% yang berarti cukup baik dengan. Namun tiga indikator capaian yang masih 0 karena keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022.

**Tabel III. 17 Capaian Kinerja dengan Target Renstra Kementerian PDDT 2019-2024**

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Target Nasional	Perbandingan
1	Tujuan : Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Presentase desa maju dan mandiri	39,3%	5,2%	755,7%
		Jumlah Desa Mandiri	14	3.944	0,35%

Capaian kinerja tahun 2022 pertumbuhan jumlah desa mandiri diatas jumlah pertumbuhan di tingkat nasional. Sedangkan jumlah tersebut berkontribusi 0,35% untuk capaian nasional yang menargetkan jumlah desa mandiri tahun 2022 sejumlah 3.944 desa dari 75.265 seluruh Indonesia.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang memiliki anggaran kegiatan sebesar Rp. 12.407.255.000,- (*Dua belas milyar empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*) terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 12.045.338.677,- , terdiri dari :
  - b. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.944.934.527,00
  - c. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 7.805.669.150,00
  - d. Belanja Hibah sebesar Rp. 1.294.735.000,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 171.516.000,-

dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 12.216.854.677,- (*Dua belas milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) atau 98,47%. Adapun untuk capaian anggaran per program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III. 16 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2022**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>I</b>	<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.978.653.200,00</b>	<b>3.907.345.336,00</b>	<b>98,21</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.500.000,00	26.659.050,00	96,94
2	Administrasi keuangan Perangkat daerah	2.956.775.000,00	2.930.257.627,00	99,10
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	7.778.500,00	5.819.000,00	74,81
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	227.484,918,00	217.498.215,00	95,61
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	684.290.000,00	659.185.694,00	96,33
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	74.824.782,00	67.925.750,00	90,78
<b>II</b>	<b>Program penataan Desa</b>	<b>231.400.000,00</b>	<b>224.943.000,00</b>	<b>97,21</b>
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	231.400.000,00	224.943.000,00	97,21

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>III</b>	<b>Program Kerjasama Antar Desa</b>	<b>2.225.530.000,00</b>	<b>2.196.952.115,00</b>	<b>98,72</b>
1	Fasilitasi Kerjasama antar desa	2.225.530.000,00	2.196.952.115,00	98,72
<b>IV</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>5.023.583.800,00</b>	<b>4.956.312.226,00</b>	<b>98,66</b>
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	5.023.583.800,00	4.956.312.226,00	98,66
<b>V</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat</b>	<b>948.088.000,00</b>	<b>931.302.000,00</b>	<b>98,23</b>
1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	948.088.000,00	931.302.000,00	98,23

Sumber Data : Laporan Keuangan Dinpermades 2022

Anggaran Dinpermades Tahun 2022 terdiri dari 5 Program, dan 10 kegiatan dan secara keseluruhan capaian anggaran program dan kegiatan Dinpermades mencapai rata-rata 98,47 %.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Dinpermades Kabupaten Rembang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ” **BAIK** ” yaitu dengan nilai rata-rata **81,41%**,

#### **4.2 REKOMENDASI**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Rembang sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;

5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN REMBANG



*[Handwritten Signature]*  
Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670520 199303 1 010